



LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jln. S. Parman No.7 Telp. (0286) 594442 Banjarnegara 53412

Website : dispermadesppkb.banjarnegarakab.go.id E-mail: dispermadesppkb@banjarnegarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.

Dalam laporan ini disampaikan tentang Langkah-langkah penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yang meliputi Persiapan, Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisis Data serta Penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan tanggungjawab kepada pemangku kepentingan dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak dan Tim Survei Kepuasan Masyarakat yang telah banyak membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, 15 September 2023

Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banjarnegara



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM.....	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	8
BAB IV	9
ANALISIS HASIL SKM	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	10
4.3 Tren Nilai SKM.....	11
4.4 Tindak Lanjut.....	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14
1. Kuesioner	14
2. Hasil Pengolahan Data	14
3. Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan kolaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja DispermadesPPKB Kabupaten Banjarnegara;
2. Mendorong DispermadesPPKB Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong DispermadesPPKB Kabupaten Banjarnegara untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik DispermadesPPKB Kabupaten Banjarnegara.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik pada DispermadesPPKB Kabupaten Banjarnegara;
2. Diketahui kinerja DispermadesPPKB Kabupaten Banjarnegara yang telah dilaksanakan secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada DispermadesPPKB Kabupaten Banjarnegara.
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat tentang kinerja pelayanan DispermadesPPKB Kabupaten Banjarnegara.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Nomor : 067/022 Tahun 2023 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara pada jam layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	April 2023	8
2.	Pengumpulan Data	Mei-Juli 2023	60

3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Agustus 2023	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	September 2023	15

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Jumlah Responden yang menjadi sasaran Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara sejumlah 101 orang yang dipilih secara acak sesuai dengan cakupan layanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang yaitu 101 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	56	55,5%
		PEREMPUAN	45	44,5%
2	PENDIDIKAN	SLTA	60	59,41%
		DI/DII	13	12,87%
		DIII/DIV	9	8,91%
		SI	19	18,81
		S2	-	
		S3	-	
3	PEKERJAAN	PNS	10	9,9%
		TNI	1	0,99%
		POLRI		
		LAINNYA	90	89,11%
4	JENIS LAYANAN	LAYANAN Bid.PEMDES	32	31,68%
		LAYANAN Bid. PKPTRP	44	43,57%
		LAYANAN Bid.PUEMTTG	21	20,79%
		LAYANAN Bid.KB	1	0,99%
		LAYANAN KEPEGAWAIAN	3	2,97%

5	USIA	<20	7	6,93%
		21-30	67	66,34%
		31-40	12	11,87%
		41-50	13	12,97%
		51-60	1	0,99%

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,307	3,317	3,198	3,416	3,317	3,297	3,426	3,267	3,525
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	83,53 (Baik)								



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,198. Selanjutnya nilai terendah kedua yaitu Sarana Prasarana yang mendapatkan nilai 3,267, dan nilai terendah ketiga yaitu Kompetensi dengan nilai 3,297.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan mendapatkan nilai tertinggi pertama yaitu 3,525, dan Perilaku Petugas mendapat nilai tertinggi kedua yaitu 3,426 serta Biaya mendapatkan nilai tertinggi ketiga yaitu 3,416.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Mohon untuk ditambah sarana dan prasarana yang ada ”.
- “Tidak ada sarana parkir yang memadai disaat hujan”
- “Kemampuan petugas untuk lebih ditingkatkan”.
- “Pelayanan untuk lebih dipercepat ”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih perlu dipercepat. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah SDM dan masih adanya pemahaman bahwa untuk konsultasi dan koordinasi terkait dengan layanan harus datang langsung ke Dinas.
- Sarana dan prasarana masih perlu ditambah. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang ada sehingga DispermadesPPKB belum dapat mencukupi kebutuhan kantor seperti aula, garasi yang memadai. Namun demikian untuk beberapa hal dapat tercukupi seperti kursi tunggu, laptop, printer, TV, untuk mendukung peningkatan kualitas layanan.

- Kompetensi pelaksana untuk lebih ditingkatkan, Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah SDM yang ada sehingga terkesan kemampuan petugas kurang. Sehingga peningkatan kapasitas petugas layanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman perlu untuk terus ditingkatkan baik oleh DispermadesPPKB Kabupaten maupun Dispermadesdukcapil dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik maka hasil analisa ini dibuat dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

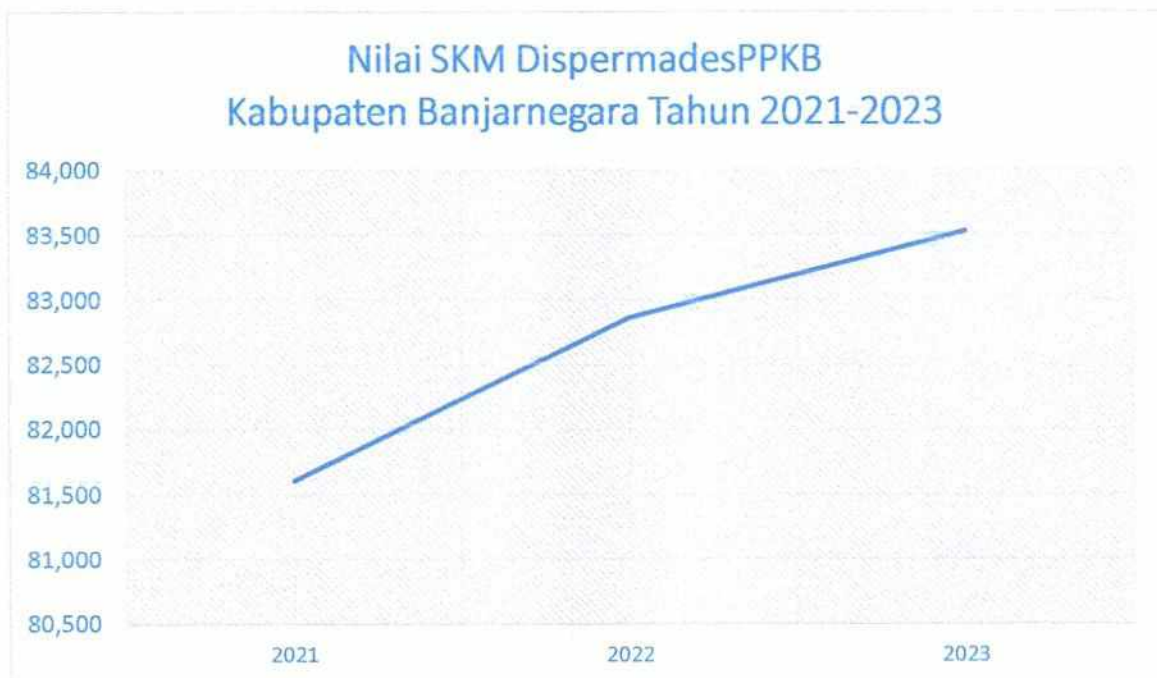
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM Tahun 2022 dilakukan melalui Rapat Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun 2023 sebagai Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan (Para Camat) pada tanggal 11 Januari 2023 (Bukti Dukung terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Produk Layanan	Peningkatan monitoring dan Evaluasi terhadap produk layanan melalui Pengukuran kinerja	v	v	v	v	Sekretariat dan Bidang-Bidang
2	Sarana dan Prasarana	1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	v	v	v	v	Sekretariat

		2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
3	Waktu Pelayanan	Pengusulan penambahan jumlah petugas layanan	v	v			Sekretariat

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

4.4 Tindak Lanjut

Adapun hasil tindak lanjut atas saran, masukan dan rekomendasi atas hasil suvei tahun sebelumnya yang direncanakan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan yg akan ditindaklanjuti	Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut
1.	Produk Layanan	Peningkatan monitoring dan Evaluasi terhadap produk layanan melalui Pengukuran kinerja	Pengukuran Kinerja Triwulan	Pengukuran Kinerja Triwulan
2.	Sarana dan Prasarana	1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1) Pengadaan Kursi Tunggu 2) Pengadaan TV 3) Pengadaan Laptop dan Printer 4) Pemasangan pengaman untuk jalur disabilitas 5) Rehab Garasi (APBDP 2023)	1) Pengadaan Kursi Tunggu 2) Pengadaan TV 3) Pengadaan Laptop dan Printer 4) Pemasangan pengaman untuk jalur disabilitas
3.	Waktu Pelayanan	Pengusulan penambahan jumlah petugas layanan	Nota dinas usulan tambahan pegawai	Penambahan pegawai melalui Formasi PPPK

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik. Hal ini terbukti dari nilai Survei Kepuasan Masyarakat yaitu 83,53 dan menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2023.
2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,198. Selanjutnya nilai terendah kedua yaitu Sarana Prasarana yang mendapatkan nilai 3,267, dan nilai terendah ketiga yaitu Kompetensi dengan nilai 3,297.
3. Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan mendapatkan nilai tertinggi pertama yaitu 3,525, dan Perilaku Petugas mendapat nilai tertinggi kedua yaitu 3,426 serta Biaya mendapatkan nilai tertinggi ketiga yaitu 3,416.

Banjarnegara, 16 September 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banjarnegara



HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681130 199703 1 007

LAMPIRAN

1. Kuesioner

No:.....(oleh petugas)

Yth. Para Responden

Melalui Qustioner berikut, Dispermades PPKB akan melakukan survey mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara (PNS) dilingkungan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara. Hasil survey ini dimaksudkan sebagai gambaran kualitas pelayanan di Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara. Untuk itu, dimohon kepada Bpk/Ibu sebagai responden dapat mengisi pertanyaan dibawah ini dengan sebenarnya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Berilah tanda pada pilihan anda, contoh

☒

Atau

☐

Pekerjaan :

☐	PNS
☐	TNI
☐	POLRI
☐	Lainya

Pendidikan :

☐	SLTA/Sederajat
☐	D.I/D.II
☐	D.III/D.IV
☐	Strata 1
☐	Strata 2
☐	Strata 3

Jenis Kelamin :

☐	Pria
☐	Wanita
☐	Umur :

Jenis layanan yang diterima :

PENDAPAT ANDA TENTANG KAMI :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan persyaratan pelayanan dengan jenis layanannya ?

☐ Tidak jelas	☐ Jelas
☐ Kurang Jelas	☐ Sangat jelas

2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Dispermades PPKB?

☐ Tidak mudah	☐ Mudah
☐ Kurang mudah	☐ Sangat mudah

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu pelayanannya?

☐ Tidak cepat	☐ Cepat
☐ Kurang cepat	☐ Sangat cepat

4. Dalam fasilitasi dan pelayanan di Dispermades PPKB tidak dipungut biaya ?

☐ Tidak setuju	☐ Setuju
☐ Kurang setuju	☐ Sangat setuju

5. Bagaimana menurut Saudara mengenai standar pelayanan antara yang disosialisasikan dengan hasil yang diberikan ?

☐ Tidak sesuai	☐ Sesuai
☐ Kurang sesuai	☐ Sangat sesuai

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas pelayanan dalam melayani Saudara ?

☐ Tidak kompeten	☐ Kompeten
☐ Kurang kompeten	☐ Sangat kompeten

7. Bagaimana pendapat Saudara mengenai perilaku petugas dalam pelayanan terkait keramahan, dan kesopanan ?

☐ Tidak Sopan dan tdk ramah	☐ Sopan & ramah
☐ Kurang sopan & tdk ramah	☐ Sangat sopan & ramah

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana di Dispermades PPKB?

- ☐ Buruk ☐ Baik
☐ Cukup ☐ Sangat baik

9. Bagaimana tanggapan Saudara mengenai penanganan pengaduan pengguna layanan ?

- ☐ Tidak ada ☐ Berfungsi kurang maksimal
☐ Ada tapi tidak berfungsi ☐ Dikelola dengan baik

Saran dan Masukan :

.....

Banjarnegara,

"Terimakasih atas partisipasi Saudara telah berkenan mengisi lembar survey Kepuasan Masyarakat ini "

2. Hasil Olah Data SKM

NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	4	4	4	4	3	4
2	4	4	3	4	3	3	3	4	4
3	3	4	3	3	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	3	3	4	3	4
5	3	3	3	3	3	4	3	3	3
6	3	3	3	3	3	4	3	3	3
7	4	4	3	4	4	3	4	4	4
8	3	3	3	3	3	3	3	3	4
9	4	4	3	4	4	3	4	3	4
10	4	4	3	4	3	3	4	4	4
11	4	3	3	4	4	3	4	4	4
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	4	4	3	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	3	4	4	4	4	4	4
16	3	4	3	3	3	4	3	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	3	4
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	3	3	4	4	4	4	4	3	4
20	3	4	3	4	4	3	4	4	4
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	4	4	4	3	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	3	3	3	3	3	4	4	4
25	3	3	3	3	3	3	4	3	4
26	4	4	4	4	4	4	4	3	4
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	3	3	3	3	3	3	3	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	3	4

31	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	3	3	4	4	3	3	4	3	4
34	3	3	4	4	3	3	4	3	4
35	3	3	4	3	3	3	4	3	4
36	3	3	3	4	4	4	3	3	4
37	3	3	3	4	3	4	4	3	4
38	3	3	3	3	3	3	3	3	4
39	3	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3
42	3	3	3	4	3	3	4	3	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3
46	4	4	3	4	3	4	4	4	4
47	4	3	3	4	3	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	3	4	4	4	4	4	4
50	4	4	3	4	4	4	4	4	4
51	3	3	3	3	3	3	3	3	4
52	3	3	2	3	3	3	3	3	3
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3
54	3	3	3	3	3	3	3	3	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3
58	3	4	4	4	4	3	4	3	4
59	3	3	3	3	3	3	3	2	3
60	4	3	3	3	3	3	3	3	3
61	3	3	3	3	3	3	3	3	4
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3
67	3	3	3	3	3	3	3	3	4
68	4	4	4	3	4	3	3	4	4
69	3	3	4	3	3	4	3	3	4
70	4	4	3	4	4	3	4	4	4
71	3	3	3	4	3	4	4	4	4
72	4	4	3	4	3	4	4	4	4
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3
74	3	3	3	3	3	3	4	2	2
75	3	3	3	3	4	4	3	3	1
76	3	4	4	3	4	3	3	4	4
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3
79	3	3	4	3	4	3	3	3	4
80	3	3	3	3	3	3	3	3	4
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3
82	4	3	3	3	3	3	3	2	3
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3
84	3	3	2	3	3	3	3	2	3
85	3	3	3	4	3	3	4	4	4

86	3	4	3	4	4	3	3	3	3
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3
89	3	3	3	3	3	3	3	3	4
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3
91	4	3	3	3	3	3	3	3	3
92	3	3	3	4	4	3	4	4	3
93	3	3	3	4	3	3	3	2	3
94	3	4	4	4	3	3	3	3	3
95	3	3	3	4	3	3	4	4	3
96	3	3	3	4	3	3	4	4	4
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3
100	4	3	3	3	3	3	3	3	3
101	3	3	3	3	3	3	3	2	3
SNilai /Unsur	334	335	323	345	335	333	346	330	356
NRR / pertanyaan	3.307	3.317	3.198	3.416	3.317	3.297	3.426	3.267	3.525
NRR tertbg/ pertanyaan	0.367	0.369	0.355	0.380	0.369	0.366	0.381	0.363	0.392
NRR tertbg/unsur	0.367								
IKM Unit pelayanan							*)	**) 3.341	83.526

Keterangan :

- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3.307
U2	Prosedur Pelayanan	3.317
U3	Kecepatan Pelayanan	3.198
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3.416
U5	Kesesuaian Pelayanan	3.317
U6	Kompetensi Petugas	3.297
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.426
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.267
U9	Penanganan Pengaduan	3.525

IKM UNIT PELAYANAN :		83.53
-----------------------------	--	--------------

Mutu Pelayanan :	Baik
-------------------------	-------------

Mutu Pelayanan :

- | | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| A (Sangat Baik) | : 88,31 - 100,00 | C (Kurang Baik) | : 65,00 - 76,60 |
| B (Baik) | : 76,61 - 88,30 | D (Tidak Baik) | : 25,00 - 64,99 |

	% JAWABAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Tidak Baik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
Kurang Baik	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.99
Baik	69.31	68.32	76.24	58.42	68.32	70.30	57.43	61.39	42.57
Sangat Baik	30.69	31.68	21.78	41.58	31.68	29.70	42.57	32.67	55.45
kosong	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total Responden	101	101	101	101	101	101	101	101	101

	JUMLAH JAWABAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Tidak Baik	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Kurang Baik	0	0	2	0	0	0	0	6	1
Baik	70	69	77	59	69	71	58	62	43
Sangat Baik	31	32	22	42	32	30	43	33	56
kosong	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Responden	101	101	101	101	101	101	101	101	101

URUTAN
PERINGKAT

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U9	Penanganan Pengaduan	3.525
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.426
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3.416
U2	Prosedur Pelayanan	3.317
U5	Kesesuaian Pelayanan	3.317
U1	Kesesuaian Persyaratan	3.307
U6	Kompetensi Petugas	3.297
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.267
U3	Kecepatan Pelayanan	3.198

3. Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM (Penyelenggaraan FKP)

- Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218 Fax. 591187
Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53414
<http://banjarnegarakab.go.id> E-mail : pemda@banjarnegarakab.go.id

Banjarnegara, 7 Januari 2023

Nomor : 005/073/Setda/2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat Koordinasi persiapan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun 2023

Kepada

Yth. Para Camat Se - Kab Banjarnegara
di

BANJARNEGARA

Dalam rangka Rapat Koordinasi persiapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023, dengan ini mengharap kehadiran Saudara dengan keikutsertaan sebagai berikut :

Hari/tanggal : Rabu, 11 Januari 2023

Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Villa Surya Yudha Park 2
Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara

Keterangan : - Rapat Koordinasi akan dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Banjarnegara
- Hadir secara pribadi

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terimakasih.

a.n. Bupati Banjarnegara
Sekretaris Daerah


DRS. INDARTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196510031986071001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pj Bupati Banjarnegara

- Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
 Jalan S. Parman No. 7 Telp/Fax. (0286) 594442 Banjarnegara
 Website : <http://dispermades.banjarnegara.go.id> Surat Elektronik : kpmd@banjarnegara.go.id
 BANJARNEGARA Kode Pos: 53412

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
 Tempat : Villa Surya Yudha Park 2
 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara
 Acara : Rapat Koordinasi persiapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Alamat/Instansi	Tanda Tangan
1.	Agus P	Camat Bawu	Bawu	1. [Signature]
2.	Anang	Camat Mandiraja	Mandiraja	2. [Signature]
3.	Hari Anugrah	Pengantar	Pengantar	3. [Signature]
4.	Sugito	Camat	Pandawarna	4. [Signature]
5.	Mahmud Syah	Camat	Karangasem	5. [Signature]
6.	Anggoro	Camat	Banjarnegara	6. [Signature]
7.	Siti Khatir	Sekecam	Polek	7. [Signature]
8.	Susanto	Camat	Susikan	8. [Signature]
9.	Anton R	Camat	Bawu	9. [Signature]
10.	Erwan Arif	Camat	Purwodadi	10. [Signature]
11.	Septi A	Camat	Mandiraja	11. [Signature]
12.	Sekeloa	Camat	Praja	12. [Signature]
13.	Edy Purwono	Kasi Tagu-	Palibang	13. [Signature]
14.	Tajir N. G	Camat	Kaditana	14. [Signature]
15.	Bakusari D	Camat	BANJARNEGARA	15. [Signature]
16.	WARIS PR	Camat	Purworejo	16. [Signature]
17.	Sonhig	Camat	Kempak	17. [Signature]
18.	Moh. Idris	Camat	Pinggolan	18. [Signature]
19.	Soe W	Camat	Wanure	19. [Signature]

No	Nama	Jabatan	Alamat/Instansi	TandaTangan
20.	1. Lm DA	Carat	Gigoh	20.
21.	m. ULIL ALHAS	KORPORASI	KEMENDAG RI	21.
22.	Agung Nis	Dispermoda PPKB	Bayungrejo	22.
23.				23.
24.	Asriyah	Brday KB	Dispermoda PPKB	24.
25.	WICAKSANA ARDI	JFU	SETDA	25.
26.	Mubono	— II —	— II —	26.
27.	Diah Ayu.P	PSM	Dispermoda PPKB	27.
28.	Schafu	Kel. Puri	Kyau	28.
29.	Ereng S.	Kel. PD	—	29.
30.	Gri Sudaryati	Seledu	Dispermoda PPKB	30.
31.	Chasanudin. SE	Kari	—	31.
32.	Guryati. SE	Staf	—	32.
33.	Ika Dewi H.	Staf	—	33.
34.	Ika H. N	Staf	—	34.
35.	Sudarmo	Staf	—	35.
36.	dy. S	Staf	—	36.
37.	Yuni I	Staf	—	37.
38.	Ira T Marnaningih	Staf	—	38.
39.	Uni Wuryaningun	Perencana	Dispermoda PPKB	39.
40.	Hendro Cahyoro	Kadin	Dispermoda PPKB	40.
41.	Agung Hermawan	Kelid Pkinder	Dispermoda PPKB	41.
42.	Stano	Staf	—	42.
43.	Enisefek	Staf	Dispermoda PPKB	43.
44.	Laili Lashu	Kasubag Unper	—	44.

No	Nama	Jabatan	Alamat/Instansi	TandaTangan
45.	Eka Hendayana	Staf	Dispermades PPKB	45. 
46.	Fika Werginetya	Staf	Dispermades PPKB	46. 
47.	Ayushita Ely H.	Sub Koordinator	Dispermades	47. 
48.	Lufti-jad	Staf	Dispermades	48. 
49.	Arisman N.V	Staf	"	49. 
50.	Anggi B	Staf	"	50. 

• Notulen Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NOTULEN KEGIATAN RAKOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2023

I. PELAKSANAAN

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023

Tempat : Villa Surya Yudha Park 2
Rejasa Banjarnegara

Peserta : Para Camat se Kabupaten Banjarnegara, Tenaga Ahli Pendamping Desa
dan DispermadesPPKB

II. HASIL SEBAGAI BERIKUT :

- Acara pelaksanaan Rakor Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023 dibuka oleh Pj. Bupati Banjarnegara.

Pada sambutan dan pengarahan kepada para camat se kabupaten Banjarnegara bahwa inovasi inovasi perlu dilakukan di setiap sector bidang tugas pemerintahan kecamatan agar dapat meningkatkan kualitas kepada masyarakat maupun kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diberikan secara delegative.

- Penyampaian Materi dilanjutkan dengan diskusi

Penyampaian materi oleh Para Kabid DispermadesPPKB terkait dengan program dan kegiatan dari masing-masing bidang :

1. Bidang Pemdes, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif
2. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
3. Bidang Keluarga Berencana
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi
5. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan
6. Sekretaris

Dilanjutkan diskusi terkait penyelenggaraan pemerintah dengan Bupati Banjarnegara, dengan pertanyaan antara lain :

- a. Memperhatikan kondisi BUMDes, perlu adanya pendampingan yang lebih massif dari DispermadesPPKB. (Camat Purwanegara)
- b. Dalam rangka percepatan penurunan stunting perlu ada kejelasan siapa mengerjakan apa dengan target berapa. (Camat Sigaluh)
- c. Peran Penyuluh KB dan koordinasi dengan lintas sektor tingkat kecamatan perlu ditingkatkan (Camat Mandiraja, Camat Purwareja Klampok)

- d. Perlu pendampingan pengisian perangkat desa, peningkatan kapasitas perangkat, kualitas perangkat desa untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. (Camat Karangobar)
- e. Perlu peningkatan sarana dan prasarana DispermadesPPKB dan penambahan jumlah pegawai untuk melayani kecamatan dan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

➤ Penutup

Acara ditutup oleh Kepala DispermadesPPKB dengan menekankan terkait persiapan pemilihan BPD, pengisian perangkat desa, Pengelolaan Dana Desa, Pengembangan BUMDes, Pasar Desa, Bankeu dan Stunting.

Notulis,



Agustina Ely Hartini, S.IP
NIP. 19690825 200312 2 007

- Foto Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa





**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. S.Parman No.7 Telp (0286) 594442 Banjarnegara 53412

Website: dispermadesppkb.banjarnegarakab.go.id Email: dispermadesppkb@banjarnegarakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 067/022 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran RI Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 268);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 36).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan rancangan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berdasar ketentuan yang berlaku;
2. Menyusun Quesioner Survei Kepuasan Masyarakat;
3. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Mengolah Hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

5. Menyajikan dan melaporkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal : 20 April 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA**



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Banjarnegara;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
 4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
 6. Yang bersangkutan
-

Lampiran Keputusan Kepala DispermadesPPKB
Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 067/022 Tahun 2023
Tanggal: 20 April 2023

**SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NO	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi	Anggota
8.	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Anggota
9.	Pengadministrasi Umum	Anggota

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA**


HENDRO CAHYONO